

**EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018**

Tesis



Oleh

ERY PUSPANDOYO
NIM. 161503278

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2018**

**EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh

ERY PUSPANDOYO
NIM. 161503278

Kepada

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2018**

TESIS
EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018

Oleh :

ERY PUSPANDOYO
NIM. 161503278

Tesis telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 September 2018

Dosen Penguji I

Dr. Wahyu Widayat, M.Ec.

Dosen Pembimbing I

Dosen Penguji II/ Pembimbing II

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

Dwi Novitasari, S.E., M.M.

Dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar magister

Yogyakarta, September 2018

Mengetahui,

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
DIREKTUR

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Yogyakarta, September 2018

ERY PUSPANDOYO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Pembimbing I sekaligus Direktur STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
2. Dwi Novitasari, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Segenap dosen dan staf STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Orang tua, istri dan anakku tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril dan materiil selama mengikuti pendidikan di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Teman-teman angkatan 16.IH yang senantiasa kompak dan saling mendukung berbagi suka duka dan bekerjasama selama menempuh pendidikan.
7. Segenap jajaran Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
8. Para penyuluh Pertanian Kabupaten Purworejo.
9. Masyarakat tani Kabupaten Purworejo.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pegawai.

Yogyakarta, September 2018

ERY PUSPANDOYO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teori	11
B. Hasil Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	24
B. Definisi Operasional	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	26

E.	Jenis dan Sumber Data	26
F.	Metoda Pengumpulan Data	27
G.	Instrumen Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Tentang Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo	35
B.	Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	38
C.	Faktor-faktor Penyebab Kurang Optimalnya Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo	43
D.	Upaya Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo	47
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN		
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran	53
C.	Keterbatasan	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya dan Utama Tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Purworejo	7
Tabel 1.2	Produksi Rata-Rata Komoditas Padi Sawah, Jagung dan Kedelai Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Purworejo	8
Tabel 3.1	Parameter Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	29
Tabel 3.2	Standar Nilai Prestasi Kerja (NPK) Penyuluh Pertanian	34
Tabel 4.1	Jumlah Penyuluh Pertanian per Kecamatan di Kabupaten Purworejo.....	36
Tabel 4.2	Hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2017	38

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo	37
---	----

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun 2017

Lampiran 2. Foto wawancara

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

INTISARI

Mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan penyuluh pertanian yang berkinerja tinggi di semua daerah termasuk di Kabupaten Purworejo. Masalah yang ada di Kabupaten Purworejo adalah menurunnya produksi rata-rata padi sawah, jagung dan kedelai di Tahun 2016 serta berkurangnya jumlah kelompok tani yang ada di tingkat utama dan madya pada Tahun 2017. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo yang kurang optimal.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja, mengevaluasi kinerja dan merumuskan upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian deksripsi kualitatif. Data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara komparatif dengan standar mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013.

Penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo sudah baik. Hal ini didukung antara lain tingkat pendidikan penyuluh pertanian yang sudah baik, pengangkatan tenaga kontrak/ Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh pertanian menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah telah berusaha melengkapi sarana prasarana penyuluhan seperti pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan dan penyediaan sarana prasarana penyuluhan meskipun masih sangat terbatas, motivasi penyuluh pertanian yang baik serta keberadaan penyuluh pertanian dirasakan manfaatnya oleh petani. Meskipun demikian kinerja penyuluh pertanian masih perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal terutama dalam hal intensitas kunjungan lapangan serta penguasaan materi penyuluhan baik secara teori maupun praktek.

Faktor-faktor penyebab kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo kurang optimal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan personal, intensitas pelatihan/ bimbingan teknis, fasilitas prasarana dan sarana penyuluhan, dukungan pemerintah daerah, pengawasan kerja penyuluh pertanian dan sinergitas organisasi, penerapan sistem *reward and punishment* yang belum optimal, birokrasi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang cenderung apatis terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya serta tingkat sumber daya manusia petani yang rendah.

Upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan sistem pengawasan penyuluh pertanian yang lebih jelas , meningkatkan kelengkapan sarana prasarana, fasilitas pembelajaran penyuluhan, dukungan pemerintah daerah, sinergitas organisasi dan penguasaan wilayah binaan, selalu *update* ilmu dan teknologi serta menjalankan sistem *reward and punishment* dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, kinerja, penyuluh pertanian, Kabupaten Purworejo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris sehingga pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Di masa era reformasi banyak dihadapkan pada masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, gizi buruk dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat perkembangan pembangunan bangsa sehingga diperlukan penanganan secara terintegrasi dan terarah serta terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan pada pembangunan sektor pertanian nasional yang menjadi basis ekonomi rakyat. Pembangunan pertanian menghendaki pertanian yang dinamis yaitu pertanian yang dicirikan antara lain oleh penggunaan teknologi baru yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan peran serta petani dan keluarganya dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. Proses pelaksanaan pembangunan pertanian yang bermartabat perlu didukung oleh agen-agen pembangunan yaitu penyuluh pertanian yang kompeten dan memiliki kinerja yang baik dalam tugasnya melakukan penyuluhan (Bahua, 2016).

Kinerja penyuluh pertanian yang baik merupakan dambaan setiap *stakeholder* pertanian. Keadaan petani saat ini yang masih banyak terbelenggu pada kemiskinan merupakan ciri bahwa penyuluhan pertanian

masih perlu untuk terus meningkatkan perannya dalam rangka membantu petani memecahkan masalah mereka sendiri terutama dalam aspek usaha tani mereka secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan definisi penyuluhan pertanian itu sendiri sebagai suatu bentuk pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan titik fokus pada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Kondisi penyuluhan pertanian yang terus mengalami perubahan baik sejak pemerintahan orde lama, orde baru sampai orde reformasi turut mempengaruhi citra penyuluhan pertanian (Sapar *et al.*, 2012).

Pada masa orde baru penyuluhan pertanian dicitrakan sebagai alat pemerintah dalam membantu pemerintah menciptakan swasembada pangan dengan pendekatan peningkatan produksi usaha tani oleh petani. Penyuluhan pertanian pada saat itu sangat diperhatikan dan dinilai sukses mengantarkan swasembada pangan. Selanjutnya pada masa orde reformasi, penyuluhan pertanian mengalami masa suram terutama dengan perubahan kelembagaan penyuluhan itu sendiri dengan keluarnya undang-undang otonomi daerah yang secara langsung berdampak pada kinerja penyuluh pertanian. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan suatu penegasan kembali bahwa penyuluhan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka memajukan pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat umum berkewajiban untuk

menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Sapar *et al.*, 2012).

Kinerja penyuluh pertanian ditentukan pada tingkat pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi penyuluhan pertanian dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, kinerja penyuluh pertanian didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang diuraikan secara komprehensif pada uraian macam-macam tugas-tugas yang akan dilakukan. Kinerja penyuluh pertanian secara garis besarnya dapat dilihat pada aspek persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan penyuluh pertanian dan pengembangan profesi penyuluh pertanian.

Keberhasilan penyuluh pertanian terlihat dari indikator-indikator sebagaimana tertuang di Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671 Tahun 2006 dalam Sunartomo (2016) sebagai berikut :

1. Tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani.

Hal pertama yang harus dilakukan penyuluh pertanian adalah menyusun program-program yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini penting dilakukan agar kegiatan penyuluhan tepat sasaran dan dapat diaplikasikan oleh petani.

2. Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing.

Penyusunan rencana kerja penting sebagai acuan dasar para penyuluh dalam menjalankan tugasnya agar lebih terarah dan tepat waktu.

3. Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Informasi mengenai teknologi pertanian selalu disampaikan setiap adanya forum penyuluhan agar petani lebih mengetahui perkembangan teknologi atau inovasi dalam dunia pertanian. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (petani) terutama dalam hal pengolahan usaha tani sampai pada hasil produksi dan pemasaran agar ada nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan.

4. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal.

Keberdayaan dan kemandirian petani merupakan salah satu tujuan dari penyuluhan.

5. Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan.

Kemitraan usaha antara petani dan pengusaha sangat penting terutama dalam hal pemasaran hasil produksi agar lebih jelas dan terarah. Hubungan kemitraan akan berpengaruh pada harga dari produksi usaha tani sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi sarana produksi pertanian dan pemasaran.

Proses dalam usaha tani dari awal sampai pada hasil panen dan pemasaran sangat membutuhkan dana, kecukupan sarana produksi dan adanya mitra usaha pemasaran. Oleh karena itu sangatlah penting bagi

petani untuk bisa mendapatkan akses ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi, perusahaan atau pengusaha.

7. Meningkatkan produktifitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja.

Pengembangan agribisnis komoditas unggulan merupakan salah satu tujuan utama program pembangunan pertanian. Pengupayaannya dengan memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian lebih produktif dan efisien sehingga menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.

8. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah kerja.

Segala upaya yang dilakukan oleh penyuluh melalui program-program penyuluhannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani yang berdampak pula pada kesejahteraan petani.

Terkait dengan jaminan ketersediaan pangan secara kontinyu dan menghadapi era perdagangan bebas, pemerintah telah menetapkan target pembangunan pertanian. Demi tercapainya target yang telah ditetapkan perlu didukung oleh semua pihak sebagai *stakeholder* yang secara langsung bertanggungjawab dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian sebagai bagian dari *stakeholder* berkewajiban mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan pertanian melalui peningkatan kinerja dan efektifitas penyuluh.

Data laporan kinerja BPPSDM Tahun 2014 menunjukkan bahwa sasaran kinerja ketenagakerjaan penyuluhan yang belum mencapai 100% memberikan dampak pada sasaran kemandirian kelembagaan bidang Sumber daya Manusia (SDM) penyuluh yang belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di semua daerah (Banunack *et al.*, 2017).

Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari wilayah pembangunan pertanian nasional merupakan penyangga 16% kebutuhan pangan di Jawa Tengah dengan lahan sawah di Tahun 2016 seluas 29.794 Ha (BPS, 2017). Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Purworejo dilihat dari aspek kelembagaan dan produksi pada tiga komoditas utama pertanian yaitu padi sawah, jagung dan kedelai adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan kelompok tani.

Menurut Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani disebutkan bahwa pemberdayaan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individual karena jumlah dan sebaran petani sangat besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan. Oleh karena itu penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan kelompok. Hal ini mendorong petani membentuk kelembagaan tani. Penumbuhan dan pembinaan kelompok tani yang dilaksanakan secara berkesinambungan

diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Berdasarkan kemampuannya kelompok tani diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama.

Data jumlah kelompok tani kelas madya dan kelas utama pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya dan Utama Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kabupaten Purworejo

No	Kelas Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani Tahun 2016	Jumlah Kelompok Tani Tahun 2017
1.	Madya	622	499
2.	Utama	90	87

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (2016 ; 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa di Tahun 2017 jumlah kelompok tani kelas madya mengalami penurunan sejumlah 123 kelompok tani dibanding dengan Tahun 2016 dan kelompok tani kelas utama mengalami penurunan sejumlah 3 kelompok tani dibandingkan dengan Tahun 2016. Terjadinya penurunan jumlah kelas kelompok tani kelas madya dan utama disebabkan oleh dua hal yaitu kelompok tani membubarkan diri atau terjadinya penurunan kelas kelompok.

2. Produksi komoditas pertanian.

Output dari seluruh rangkaian proses kegiatan pertanian dari hulu sampai dengan hilir adalah produksi hasil pertanian. Data Produksi rata-

rata pada tiga komoditas pertanian utama yaitu padi sawah, jagung dan kedelai di Kabupaten Purworejo antara Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Produksi Rata-Rata Komoditas Padi Sawah, Jagung dan Kedelai Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Purworejo

No	Komoditas	Produksi Rata-Rata (kwt/ha)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Padi sawah	62,55	55,13
2.	Jagung	60,54	53,86
3.	Kedelai	13,51	9,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo (2016; 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa untuk komoditas padi sawah, produksi rata-rata di Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7,42 kwt/ha dibandingkan dengan Tahun 2015, komoditas jagung produksi rata-rata di Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,68 kwt/ha dibandingkan dengan Tahun 2015 dan komoditas kedelai produksi rata-rata di Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,06 kwt/ha dibandingkan dengan Tahun 2015

Terjadi penurunan jumlah kelompok tani pada kelas madya dan utama di Tahun 2017 dan penurunan produksi pada tiga komoditas utama di Tahun 2016 sebagaimana data di atas dapat disebabkan oleh faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari faktor sumber daya manusia salah satunya adalah kinerja penyuluh pertanian yang kurang optimal sebagaimana diungkapkan oleh Slamet dalam Pakpahan (2017) yang menyatakan bahwa inti kegiatan penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan

keberanian serta memberikan kesempatan bagi upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan. Salah satu aspek pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan kelembagaan. Chamala dan Shingi dalam Bahua (2016) berpendapat bahwa pemberdayaan dapat menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh dalam menolong warga masyarakat antara lain penyuluh mampu mengorganisasikan masyarakat desa dan mengelola kelompok tani dan Bahua (2016) yang mengemukakan bahwa kinerja penyuluh pertanian yang baik berdampak pada perbaikan kinerja petani dalam meningkatkan produksi usaha tani.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi serta upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo kurang optimal?
2. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
2. Mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
3. Untuk merumuskan upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.
 - b. Memperdalam pengetahuan teoritis mengenai peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi lembaga/ instansi pemerintah.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran atas upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Kinerja

Sentono dalam Sinambela (2012) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Gibson, Ivancevich dan Donnelly dalam Amins (2012) mengatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan Uno dalam Fitriana (2016) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definisi kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mahmudi (2015) adalah :

1. Faktor personal/individu meliputi, pengetahuan, ketrampilan/*skill*, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan meliputi, kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim meliputi, kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem meliputi, sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional) meliputi, tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2. Penyuluh Pertanian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, penyuluh pertanian baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Roger dan Shoemaker dalam Bahua (2016) mengemukakan bahwa penyuluh pertanian ialah pekerja profesional yang berusaha

mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi selaras dengan tujuan lembaga penyuluhan. Penyuluh berfungsi sebagai mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh merupakan agen pembaharuan dari badan, dinas atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik dengan jalan menyebarkan inovasi yang mereka produksi dan mereka miliki yang telah disusun berdasarkan kebutuhan klien.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Bahua (2016) penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi pertanian, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.

Menurut Suhardyono dalam Pakpahan (2017) merinci peran penyuluh sebagai berikut :

- a. Penyuluh sebagai pembimbing petani.

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru petani dalam pendidikan nonformal untuk orang dewasa.

- b. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator petani.

Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian tidak mungkin melakukan kunjungan pada masing-masing petani, sehingga petani harus diajak membentuk kelompok-kelompok tani dan mengembangkannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang mempunyai peran dalam mengembangkan masyarakatnya.

- c. Penyuluh sebagai teknisi.

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik karena pada suatu saat ia akan diminta oleh petani untuk memberikan saran maupun demonstrasi kegiatan usaha tani yang bersifat teknis. Tanpa adanya pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik maka akan sulit baginya dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi yang diminta petani.

- d. Penyuluh sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani.

Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian kepada petani. Sebaliknya petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada penyuluh yang membinanya.

Sebagai jembatan penghubung selanjutnya para penyuluh menyampaikan laporan tersebut kepada lembaga penelitian.

Sementara Mardikanto dalam Pakpahan (2017) mengemukakan peran penyuluh yaitu :

- a. Edukasi untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh petani dan *stakeholder* pembangunan yang lainnya.
- b. Inovasi yaitu menyebarluaskan informasi/inovasi dari sumber informasi dan penggunaannya.
- c. Fasilitasi (pendampingan) yang bersifat melayani kebutuhan yang dirasakan oleh petani.
- d. Konsultasi yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif pemecahan masalah. Peran konsultasi penting untuk memberikan rujukan kepada pihak lain yang lebih mampu untuk menanganinya. Dalam melaksanakan konsultasi maka penyuluh tidak hanya menunggu tetapi penyuluh harus mendatangi petani.
- e. Supervisi (pembinaan) yaitu upaya untuk bersama-sama petani melakukan penilaian untuk memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapinya.
- f. Pemantauan yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung dan kegiatan pemantauan lebih menonjolkan peran penilaian.

- g. Evaluasi yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan sebelum kegiatan (*formatif*), selama kegiatan (*on going*) dan setelah kegiatan selesai (*sumatif*).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 4 merinci peran penyuluhan pertanian yaitu :

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
- b. Membuka jalan akses petani dan pelaku usaha pertanian lainnya ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar petani dapat mengembangkan usahanya.
- c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
- d. Membantu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam menumbuhkembangkan organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
- e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam mengelola usaha tani.

3. Kinerja Penyuluh Pertanian

Menurut Bahua (2016) kinerja penyuluh pertanian merupakan salah satu bentuk kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian yang dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi usaha tani berdasarkan

tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani. Kinerja penyuluh pertanian terkait erat dengan peran penyuluh pertanian dalam mengimplementasikan program-program penyuluhan yang dapat merubah perilaku petani kearah yang lebih baik. Terdapat tiga peran utama penyuluh yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan yaitu :

- a. Peleburan diri atau bersatu dengan masyarakat sasaran.
- b. Menggerakkan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan berencana.
- c. Memantapkan hubungan sosial dengan masyarakat sasaran.

Penyuluh merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian. Dalam menjalankan peran tersebut penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan.

Menurut North Carolina Cooperative Extension dalam Bahua (2016) menyatakan bahwa kinerja penyuluh dapat dilihat dari kemampuan mendesain program penyuluhan yang meliputi, memahami komponen-komponen dasar program pendidikan nonformal dan mengembangkan program secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, agroekosistem dan potensi sumberdaya lokal, mampu mempublikasikan teknologi terapan melalui penyusunan materi penyuluhan yang spesifik lokasi dan mampu menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam membangun jaringan usaha yang dinamis dan berkelanjutan.

Haryadi *et al.*, Bryan dan Glenn dalam Bahua (2016) berpendapat bahwa kinerja penyuluh pertanian merupakan eksistensi penyuluh dalam memahami keterkaitan tugas dan kebutuhan dasar program penyuluhan pertanian berkualitas dan relevan dengan kebutuhan petani sebagai bagian dari misi penyuluh untuk memenuhi kepuasan petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Bahua (2016) mendefinisikan kinerja penyuluh pertanian sebagai hasil kerja penyuluh berdasarkan status kerja, kondisi kerja, kebijakan organisasi dan motivasi penyuluh dalam mengimplementasikan program penyuluhan yang dilaksanakan melalui kerjasama antara petani dan penyuluh sesuai dengan keinginan petani, kemampuan agroekosistem dan potensi sumberdaya lokal.

4. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian, yang dimaksud dengan evaluasi kinerja penyuluh pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Ada 16 parameter didalam evaluasi kinerja penyuluh pertanian yaitu :

1. Membuat data potensi wilayah dan agrosistem.
2. Memandu (pengawasan dan pendampingan) penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan kelompok).

3. Penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan.
4. Membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP).
5. Melaksanakan *desiminasi* /Penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani (dalam satu tahun).
6. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk kunjungan/ tatap muka (perorangan/ kelompok/ massal) (dalam satu tahun terakhir).
7. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk demonstrasi/ Sekolah lapang (dalam satu tahun terakhir).
8. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk temu-temu (temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha) (dalam satu tahun terakhir).
9. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk kursus (dalam satu tahun terakhir).
10. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usahatani.
11. Menumbuhkan kelompok tani/gapoktan dari segi aspek kualitas dan kuantitas.
12. Meningkatkan kelas kelompok tani dari aspek kuantitas dan aspek kualitas.
13. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek jumlah dan kualitas.
14. Meningkatkan produksi komoditi unggulan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dibandingkan produksi sebelumnya.
15. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.
16. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Banunack *et al.* (2017) dalam penelitiannya “ *Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah* “ menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian rata-rata termasuk dalam kriteria tinggi. Secara bersama-sama faktor individu penyuluh, psikologi penyuluh, organisasi penyuluh dan lingkungan kerja penyuluh berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian.

Menurut Putri *et al.* (2016) dalam penelitiannya “ *Pengaruh Pelatihan Non teknis terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian BP4K Di Kabupaten Bungo*

Provinsi Jambi “ menunjukkan bahwa frekuensi pelatihan dan motivasi dari penyuluh pertanian positif mempengaruhi kinerja penyuluh, metode pelatihan dan infrastruktur mempengaruhi efektifitas pelatihan, metode yang lebih inovatif dengan pelatihan dengan didukung oleh infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan kinerja yang lebih baik dari penyuluh, kesesuaian materi pelatihan dan rencana pembelajaran yang lebih baik akan mempengaruhi penyuluh dalam meningkatkan kinerja pelatihan, dukungan fasilitas dari organisasi penyuluhan akan meningkatkan kinerja penyuluh dan penyuluh pertanian menerima *reward*/ imbalan atas kinerja mereka.

Menurut Syafruddin *et al.* (2013) dalam penelitiannya “ *Kinerja Penyuluh Pertanian Berdasarkan Faktor Personal dan Situasional* “ menyimpulkan bahwa faktor-faktor personal penyuluh (kemampuan, motivasi, tingkat pendidikan dan masa kerja) berpengaruh signifikan dan positif sedangkan faktor situasional (frekuensi pelatihan serta dukungan sarana dan prasarana) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Konawe maka faktor personal penyuluh menjadi prioritas untuk diperhatikan menyusul faktor situasional.

Menurut Sapar *et al.* (2012) dalam penelitiannya “ *Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan* “ menunjukkan bahwa faktor-faktor internal yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian adalah kompetensi, motivasi

dan kemandirian. Pengaruh secara bersama-sama ketiga peubah tersebut adalah (R^2) 67 persen yang nyata pada $\alpha=0,05$.

Menurut Puspitasari (2009) dalam penelitian “ *Persepsi Petani Terhadap Performasi Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Pengembangan Agribisnis Kedelai di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan* “ menyatakan bahwa performasi kerja PPL dalam pengembangan agribisnis kedelai di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menurut persepsi petani sebagai salah satu sasaran kegiatan penyuluhan adalah cukup pada aspek responsivitas, baik pada aspek responsibilitas, namun kurang dalam aspek kualitas layanan. Keterbatasan kemampuan PPL dalam menyediakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, permodalan dan sumber daya lainnya menyebabkan kualitas layanan penyuluh dalam pengembangan agribisnis kedelai dirasakan petani belum optimal.

Menurut Marliati *et al.* (2008) dalam penelitiannya “ *Faktor-Faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*” menyatakan bahwa tingkat kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani relatif belum baik (kategori “ cukup”), hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh pertanian yaitu karakteristik sistem sosial (nilai-nilai sosial budaya; fasilitasi agribisnis oleh lembaga pemerintah dan akses petani terhadap kelembagaan agribisnis) dan kompetensi penyuluh (kompetensi komunikasi; kompetensi penyuluh membelajarkan petani dan kompetensi penyuluh berinteraksi sosial),

termasuk kategori “cukup” dan kompetensi wirausaha penyuluh tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh dalam memberdayakan petani.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menuliskan kejadian-kejadian pada saat penelitian dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang (*human instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen maka harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiono, 2017).

B. Definisi Operasional

Kinerja penyuluh pertanian secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para penyuluh pertanian untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Kinerja penyuluh pertanian yang akan diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 yang memuat 16 parameter pengukuran.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moleong dalam Ariwibowo (2016) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Moeliono dalam Ariwibowo (2016) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Subyek pada penelitian ini yaitu

1. Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
2. 1 orang penyuluh pertanian tingkat kabupaten.
3. 1 orang penyuluh pertanian tingkat kabupaten sebagai koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).
4. 1 orang penyuluh pertanian tingkat kecamatan sebagai koordinator penyuluh pertanian salah satu kecamatan.
5. 3 orang petani yang menjadi pengurus kelompok tani.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik penelitian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.

Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu antara bulan Agustus sampai dengan September 2018.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang diperoleh dengan cara observasi/ pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu hasil *observasi/* pengamatan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dan hasil wawancara dengan para informan terkait dengan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
2. Data sekunder merupakan data referensi pendukung yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data produksi rata-rata komoditas padi sawah, jagung dan kedelai di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan 2016, data jumlah kelompok tani tingkat madya dan utama Kabupaten Purworejo Tahun 2016 dan 2017, laporan hasil evaluasi kinerja penyuluh pertanian (individu) di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dan data monografi penyuluh pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

F. Metoda Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metoda pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terkait dengan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
2. Wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo.
3. Dokumentasi berupa dokumen/ arsip yang dibutuhkan dan ada hubungannya dengan penelitian. Dokumen yang diambil untuk penelitian ini adalah data produksi rata-rata komoditas padi sawah, jagung dan kedelai di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan 2016, data jumlah kelompok tani tingkat madya dan utama Kabupaten Purworejo Tahun 2016 dan 2017, laporan hasil evaluasi kinerja penyuluh pertanian (individu) di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dan data monografi penyuluh pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

G. Instrumen Penelitian.

Menurut Arikunto dalam Istikumatun (2015) instrumen adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya mudah dan hasilnya baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Catatan observasi.

Observasi adalah suatu metode atau teknik penulisan yang digunakan oleh penulis atau mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan mencatat melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki.

2. Pedoman wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Dalam melakukan wawancara pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan pada suatu jawaban tetapi harus selalu bersifat netral dan pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang dibuat sebelumnya (*interview guide*).

3. *Chek List* Dokumentasi.

Dokumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non insani (bukan manusia). Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan dan menafsirkan suatu peristiwa. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan arsip data di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

a. Analisis Evaluasi Kinerja penyuluh Pertanian

Evaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Parameter Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian	Parameter	Kriteria	Skor	
Persiapan Penyuluhan Pertanian	1. Membuat data Potensi wilayah dan agro ekosistem yang terdiri atas :			
	a. Peta wilayah kerja b. Peta potensi wilayah kerja c. Monografi wilayah kerja d. RKPD (Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa)	A.	a, b, c, d, dibuat	5
		B.	b dan d dibuat	4
		C.	c dan d dibuat	3
		D.	a dan d dibuat	2
		E.	d dibuat	1
	2. Memandu (pengawasan dan pendampingan) penyusunan RDKK			
	a. RUK/RUB (rencana usaha kelompok/ rencana usaha bersama) b. RDK (Rencana definitif Kelompok) c. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) d. RDKK pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani	A.	Memandu merumuskan a, b, c, dan d	5
		B.	Memandu merumuskan b, c, dan d	4
		C.	Memandu merumuskan a, c, dan d	3
		D.	Memandu merumuskan c dan d	2
		E.	Memandu Merumuskan a atau b	1

	3. Penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan :			
	a. Penyusunan program penyuluhan pertanian desa / kelurahan b. Rekapitulasi program desa/kelurahan c. Peningkatan masalah d. Pembuatan draft program e. Sinkronisasi kegiatan penyuluhan	A.	Terlibat dalam kegiatan a, b, c, d dan e	5
		B.	Terlibat dalam kegiatan a, c, d dan e	4
		C.	Terlibat dalam kegiatan a, d dan e	3
		D.	Terlibat dalam kegiatan b dan d	2
		E.	Terlibat dalam kegiatan e	1
	4. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian (RKTTP) yang memuat:			
	a. Keadaan Wilayah (potensi, produktifitas, lingkungan usaha pertanian, perilaku petani dll) b. Penetapan Tujuan c. Penetapan masalah d. Rencana kegiatan (menggambarkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biaya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk mencapai masalah yang dituangkan dalam bentuk matrik)	A.	a, b, c, dan d, dibuat	5
		B.	b dan d dibuat	4
		C.	c dan d dibuat	3
		D.	a dan d dibuat	2
E.		d dibuat	1	
Pelaksanaan penyuluhan Pertanian	5. Melaksanakan diseminasi/penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani (dalam satu tahun):			
		A.	Menyebarkan >12 judul/topik	5
		B.	Menyebarkan 8 s/d 12 judul/topik	4

	C.	Menyebarkan 5 s/d 7 judul/topik	3
	D.	Menyebarkan 2 s/d 4 judul/topik	2
	E.	Menyebarkan hanya 1 judul/topik	1
6. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk kunjungan/tatap muka (perorangan/kelompok/massal) (dalam satu tahun terakhir):			
	A.	≥ 60 kali	5
	B.	45 s/d 59	4
	C.	30 s/d 44	3
	D.	15 s/d 29	2
	E.	< 15	1
7. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk demonstrasi/Sekolah lapang (dalam satu tahun terakhir) :			
	A.	≥ 3	5
	B.	2	4
	C.	2	3
	D.	1	2
	E.	1	1
8. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk temu-temu (temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha) (dalam satu tahun terakhir) :			
	A.	≥ 3	5
	B.	2	4
	C.	2	3
	D.	1	2
	E.	1	1
9. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan dalam bentuk kursus (dalam satu tahun terakhir) :			
	A.	≥ 3	5
	B.	2	4
	C.	2	3
	D.	1	2
	E.	1	1
10. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usahatani :			
a. Memberi informasi dan menunjukkan sumber informasi	A.	a, b, c, dan d dilakukan	5
	B.	a, b dan c dilakukan	4
	C.	a dan b dilakukan	3

b. Membangun jejaring kerja antar petani	D.	a dan d dilakukan	2
	E.	a dilakukan	1
c. Membangun kemitraan			
d. Memandu membuat proposal kegiatan			
11. Menumbuhkan kelompok tani/ gapoktan dari aspek kualitas dan kuantitas			
a. Kelompok tani b. Gapoktan	A.	Lebih dari 2 kelompok tani dan 1 Gapoktan	5
	B.	2 Kelompok tani	4
	C.	1 Gapoktan	3
	D.	1 Kelompok tani	2
	E.	Tidak ada penumbuhan	1
12. Meningkatkan kelas kelompok tani dari aspek kuantitas dan aspek kualitas:			
a. dari kelompok tani pemula ke lanjut b. dari kelompok tani lanjut ke madya c. dari kelompok tani madya ke utama	A.	Lebih dari 3 kelompok tani	5
	B.	3 kelompok tani	4
	C.	2 kelompok tani	3
	D.	1 kelompok tani	2
	E.	Tidak ada peningkatan	1
13. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek jumlah dan kualitas :			
a. BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah berbadan hukum b. BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas dan belum berbadan hukum c. BUMS yang berbentuk Koperasi Tani sudah berbadan hukum	A.	Memfasilitasi a, b, c, dan d	5
	B.	Memfasilitasi a, b, dan c	4
	C.	Memfasilitasi a dan b	3
	D.	Memfasilitasi c dan d	2
	E.	Memfasilitasi d	1

	d. BUMS yang berbentuk Koperasi Tani belum berbadan hukum			
	14. Meningkatkan produksi komoditi unggulan di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) dibandingkan produksi sebelumnya			
		A.	5 % atau lebih	5
		B.	4 - < 5 %	4
		C.	3 - < 4 %	3
		D.	2 - < 3 %	2
		E.	0 - < 2 %	1
Evaluasi dan Pelaporan	15. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian			
		A.	Lebih dari 4 kali	5
		B.	Sebanyak 4 kali	4
		C.	Sebanyak 3 kali	3
		D.	Sebanyak 2 kali	2
		E.	Sebanyak 1 kali	1
	16. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian			
	a. Laporan setiap bulan	A.	a, b, c, d, dibuat	5
	b. Laporan setiap triwulan	B.	a, b, dan c dibuat	4
	c. Laporan setiap semester	C.	a, b, dan d dibuat	3
d. Laporan setiap tahun	D.	a dan d dibuat	2	
	E.	a dibuat	1	

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013

Jumlah pengukuran/ parameter sebanyak 16 parameter, setiap indikator dinilai dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Skala 1 menunjukkan kinerja paling rendah dan skala 5 menunjukkan kinerja paling tinggi. Jumlah nilai seluruh pengukuran/ parameter yaitu paling rendah 16 (jumlah pengukuran/ parameter = 16 x 1) dan paling tinggi 80 (jumlah pengukuran/ parameter = 16 x 5). Jumlah nilai pengukuran /parameter yang diperoleh penyuluh pertanian

disebut Nilai Evaluasi Mandiri (NEM) dan untuk mengukur Nilai

Prestasi Kerja (NPK) diperoleh dengan cara perhitungan :

$$\text{NPK} = \text{Total NEM} / 80 \times 100$$

Standar NPK penyuluh pertanian dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Standar Nilai Prestasi Kerja (NPK) Penyuluh Pertanian

No	Nilai	Prestasi Kerja
1.	91 keatas	Sangat Baik
2.	76 – 90	Baik
3.	61 – 75	Cukup
4.	51 – 60	Kurang
5.	50 kebawah	Buruk

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor
91/Permentan/OT.140/9/2013

STIE Widya Wiyaha
Jangan PLAGIAT

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran tentang Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo

Penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian mengingat Kabupaten Purworejo merupakan daerah agraris. Dari luas wilayah Kabupaten Purworejo yaitu 103.481 ha, 87.105 ha diantaranya merupakan lahan pertanian (BPS, 2017). Oleh karena itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari visi-misi Bupati Purworejo dalam menjalankan program-program kerjanya. Keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Purworejo sangat tergantung dari peran serta *stakeholder* pertanian salah satunya adalah penyuluh pertanian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2018, jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo sebanyak 175 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis kelamin.

Jumlah penyuluh Pertanian laki-laki sebanyak 97 orang.

Jumlah Penyuluh pertanian perempuan sebanyak 78 orang.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Jumlah penyuluh pertanian pendidikan SLTA sebanyak 55 orang.

Jumlah penyuluh pertanian pendidikan D-3 sebanyak 16 orang.

Jumlah penyuluh pertanian pendidikan S-1/ D-4 sebanyak 100 orang.

Jumlah penyuluh pertanian pendidikan S-2 sebanyak 4 orang.

3. Berdasarkan Status Kepegawaian.

Jumlah penyuluh pertanian berstatus PNS sebanyak 86 orang.

Jumlah penyuluh pertanian berstatus tenaga kontrak sebanyak 89 orang.

4. Berdasarkan jumlah penyuluh per kecamatan.

Jumlah penyuluh pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

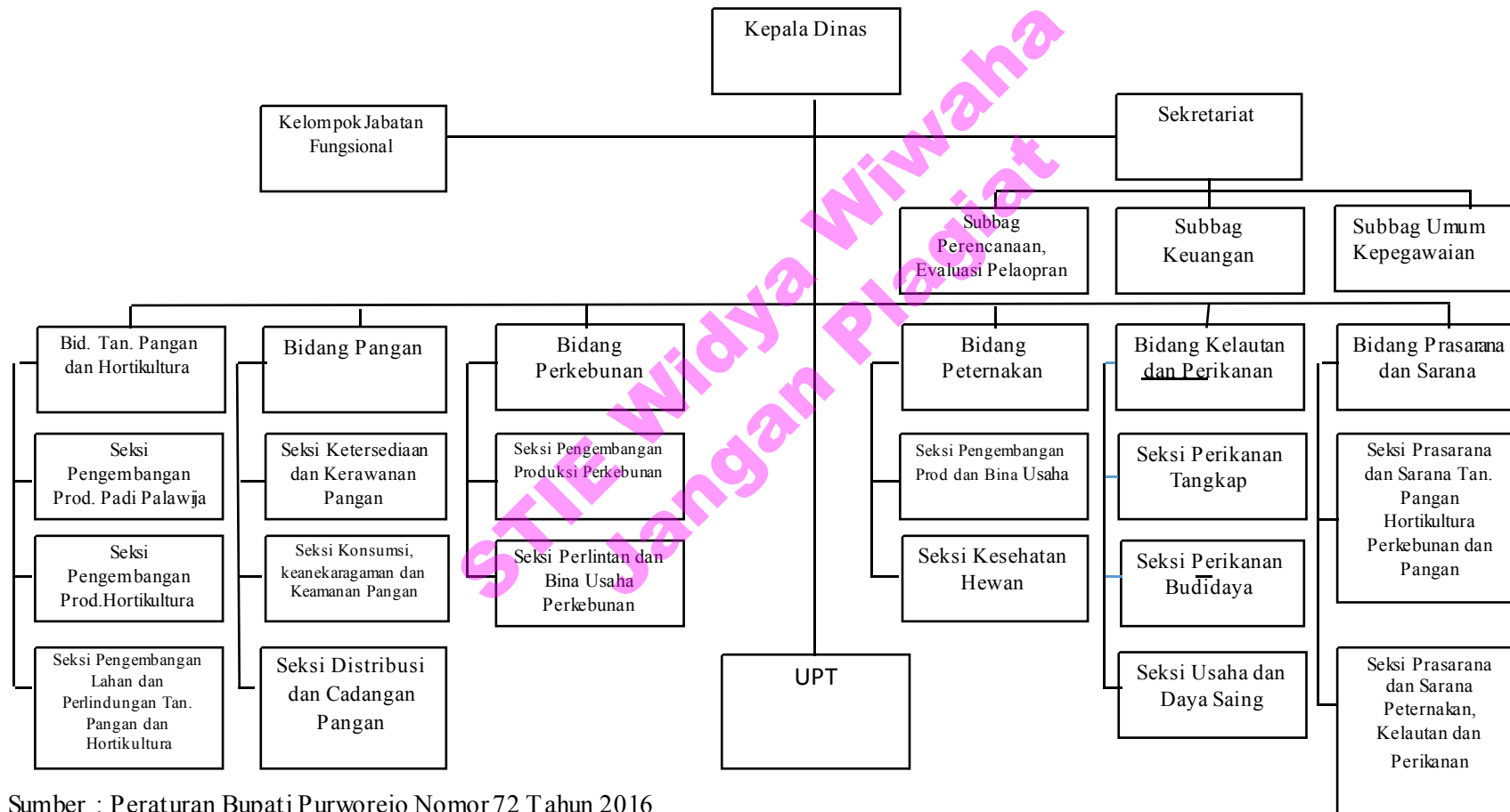
Tabel 4.1
Jumlah Penyuluh Pertanian per Kecamatan Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh Pertanian
1.	Bagelen	9 orang
2.	Banyuurip	11 orang
3.	Bayan	9 orang
4.	Bener	10 orang
5.	Bruno	8 orang
6.	Butuh	12 orang
7.	Gebang	12 orang
8.	Grabag	11 orang
9.	Kaligesing	9 orang
10.	Kemiri	12 orang
11.	Kutoarjo	11 orang
12.	Loano	9 orang
13.	Ngombol	13 orang
14.	Pituruh	12 orang
15.	Purwodadi	11 orang
16.	Purworejo	11 orang

Sumber : Data Monografi Penyuluh Pertanian Kabupaten Purworejo (2018)

Dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, penyuluh pertanian masuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO



Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2016

B. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

Penelitian terhadap evaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dilakukan untuk kinerja pada Tahun 2017. Data diambil dan diolah dari laporan hasil evaluasi kinerja penyuluh pertanian individu di Kabupaten Purworejo kemudian direkapitulasi masing-masing kecamatan sehingga diperoleh laporan evaluasi kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Purworejo
Tahun 2017

No	Penyuluh Pertanian Kecamatan	Nilai NPK Rata-Rata	Prestasi Kerja
1.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bagelen	77,92	Baik
2.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Kemiri	75,52	Cukup
3.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Pituruh	81,00	Baik
4.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bener	81,11	Baik
5.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Grabag	69,55	Cukup
6.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Kaligesing	77,81	Baik
7.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bruno	72,50	Cukup
8.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Butuh	83,65	Baik
9.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngombol	71,61	Cukup
10.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Purworejo	85,23	Baik
11.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwodadi	85,38	Baik
12.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Banyuurip	81,50	Baik
13.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Loano	82,97	Baik
14.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Gebang	75,19	Cukup
15.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Kutoarjo	77,50	Baik
16.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Bayan	77,19	Baik
Kabupaten Purworejo		78,48	Baik

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil di atas terlihat bahwa secara umum kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo berkategori baik dengan skor 78,48. Namun apabila dilihat per kecamatan ada beberapa kecamatan yang prestasi kerjanya masih dalam kategori cukup yaitu Kecamatan Kemiri, Grabag, Bruno, Ngombol dan Gebang.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Sukusnanto dalam wawancara yang dilakukan hari Jum'at tanggal 14 September 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menurut saya, kinerja penyuluh pertanian yang sekarang sangat berbeda jauh dengan penyuluh jaman dulu. Dulu saya juga pernah jadi penyuluh jadi saya tau persis bagaimana penyuluh itu. Menurut saya kinerja penyuluh sekarang masih kurang optimal sehingga perlu untuk ditingkatkan. Penyuluh sekarang lebih mengedepankan pada administrasinya yang berkaitan dengan pencapaian angka kredit sementara jadwal visit atau kunjungan lemah. Berbeda dengan penyuluh jaman dulu. Dulu setiap hari Senin sampai Kamis dilakukan untuk kunjungan lapangan. Sementara untuk hari Jumat dan Sabtu untuk mengerjakan administrasi.”

Sementara Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, Panuju Bekti, berpendapat tentang kinerja penyuluh dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sebagai berikut :

“ Kinerja penyuluh sudah baik terlihat dari capaian kinerja yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai target, program pemerintah dalam pembangunan pertanian berjalan dengan baik, permasalahan petani dilapangan bisa ditangani secara kondusif tanpa menimbulkan gejolak , kelembagaan kelompok tani mengalami peningkatan kelas secara signifikan, teknologi baru dapat diterima dan dilaksanakan oleh petani misalnya sistem jajar legowo, pada umumnya penggunaan pupuk dasar lengkap telah dilakukan oleh petani, teknologi dalam bidang mekanisasi pertanian seperti alsintan pertanian yang akhir-akhir ini banyak mendapat bantuan dari pemerintah pusat seperti rice transplanter, combine harvester, cultivator bisa diterima oleh petani. Itu semua tidak

terlepas dari peran serta para penyuluh yang ada dilapangan. Harapannya kedepan kelompok tani dapat mandiri sehingga bisa mengelola secara profesional misal menjadi UPJA mandiri yang nantinya bisa menjadi pengusaha dan mendapatkan profit untuk kepentingan bersama seluruh anggota kelompok tani”

Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo sebagaimana dikemukakan pula oleh Wahyudi selaku penyuluh pertanian tingkat kabupaten dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sebagai berikut :

“ Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo secara umum sudah baik, terindikasi dari para penyuluh sudah melakukan tugas dan fungsi sebagai penyuluh di antaranya sudah menyusun rencana dan realisasi, sudah menyusun program, sudah melakukan kunjungan kelompok bahkan pada malam hari pun mereka datang di pertemuan kelompok tani, melakukan demplot dan lain-lain”

Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngombol, Mahmudin, berpendapat tentang kinerja penyuluh pertanian dalam wawancara hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sebagai berikut :

“ Secara umum kinerja penyuluh pertanian sudah cukup . Dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada”

Ketua Gapoktan Makmur Desa Sedayu Kecamatan Loano, Yusuf Harbanto dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 mengemukakan tentang kinerja penyuluh pertanian sebagai berikut :

“ Kalau saya melihat kinerja penyuluh secara umum sudah lumayan baik. Kalau diprosentase 80 persen sudah baik. Keberadaan penyuluh pertanian kami rasakan sangat bermanfaat. Dari yang semula petani tidak tau ilmu pertanian menjadi tau. tapi masih harus ditingkatkan terutama dalam hal intensitas kunjungan ke kelompok-kelompok tani. “

Ketua Kelompok Tani Sidodadi Desa Kroyo Kecamatan Gebang, Darmadi ketika diwawancarai mengenai kinerja penyuluh pertanian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 menyatakan sebagai berikut :

“ Kerja penyuluh pertanian itu kurang maksimal. Mereka turun ke lapangan kalau ada program dari pemerintah. Disamping itu penyuluh yang ada di tempat saya pendidikannya kalau ngga salah cuman SMA jadi kalau menyampaikan materi sok kurang menguasai “

Ketua Gapoktan Sinar Mulia Desa Kaliglagah Kecamatan Loano, Waridi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 menyampaikan tentang kinerja penyuluh pertanian sebagai berikut :

“ Penyuluh pertanian itu kinerjanya menurut saya sudah cukup baik. Meskipun masih perlu ditingkatkan. Tingkat kehadiran penyuluh dalam pertemuan kelompok juga sering hadir meskipun sekali duakali tidak hadir karena mungkin ada keperluan lainnya. Tapi kadang penyuluh itu kalau menyuluh hanya teorinya saja tetapi mereka sendiri tidak pernah mempraktekkannya “

Disamping hasil analisis evaluasi kinerja penyuluh pertanian, hasil pengumpulan data melalui *observasi/* pengamatan, wawancara dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa secara umum kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo sudah baik. Faktor- faktor yang mendukung kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian yang sudah baik. Dari jumlah penyuluh pertanian Kabupaten Purworejo sebanyak 175 orang, 55 orang berpendidikan SLTA (31,42%), 16 orang berpendidikan D3 (9,14%), 100 orang berpendidikan S1/D4 (57,14%) dan 4 orang berpendidikan S2 (2,28%).

2. Pengangkatan tenaga kontrak/ Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) penyuluh pertanian menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Tahun 2017 sebanyak 27 orang tenaga kontrak/ Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pemerintah telah berusaha melengkapi sarana prasarana penyuluhan seperti pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan secara bertahap meskipun belum seluruhnya kecamatan di Kabupaten Purworejo memiliki gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sendiri dan penyediaan sarana prasarana penyuluhan meskipun masih sangat terbatas.
4. Motivasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran penyuluh di pertemuan kelompok yang dilaksanakan pada malam hari (di luar jam kerja).
5. Keberadaan penyuluh pertanian dirasakan manfaatnya oleh petani. Penyuluh melakukan transfer teknologi/ilmu pertanian ke petani.

Namun demikian meskipun hasil evaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil yang baik tetapi masih ada masalah-masalah pembangunan pertanian di Kabupaten Purworejo yang belum teratasi sehingga diperlukan peningkatan kinerja. Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara bahwa kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo masih perlu untuk ditingkatkan terutama dalam hal

intensitas kunjungan ke lapangan/ petani serta penguasaan materi penyuluhan baik secara teori maupun praktek.

C. Faktor - Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo. Menurut Mahmudi (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain

1. Faktor personal/ individu meliputi, pengetahuan, ketrampilan/ *skill*, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan meliputi, kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim meliputi, kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem meliputi, sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional) meliputi, tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap para informan. Data/ informasi yang diperoleh dari wawancara sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Purworejo, Sukusnanto :

“ Pengawasan terhadap kerja para penyuluh sekarang ini menurut saya sangat kurang. Dulu ada yang namanya PPM atau Penyuluh Pertanian Madya urusan supervisi. Tugas mereka adalah melakukan pengawasan/ supervisi terhadap kinerja penyuluh di lapangan. Mereka melakukan sidak untuk mengecek apakah penyuluh benar-benar melakukan tugasnya di lapangan atau tidak. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi sehingga pengawasan menjadi lemah yang berakibat kinerja penyuluh dilapangan menjadi tidak optimal. Disamping itu dulu ada yang namanya training yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan training adalah membahas permasalahan-permasalahn yang terjadi di lapangan dari setiap penyuluh. Sehingga ditemukan solusinya. Setelah ditemukan solusinya kemudian diaplikasikan di wilayah masing-masing sesuai masalahnya. 2 minggu kemudian dilakukan training kembali, dievaluasi sekaligus membahas masalah yang baru. Hasil evaluasi, apakah solusi tersebut sudah bisa mengatasi atau belum. Kalau belum dibahas lagi untuk menemukan solusi baru . begitu seterusnya. Jadi penyuluh semakin bertambah ilmu pengetahuannya”

2. Penyuluh pertanian kabupaten sebagai koordinator kelompok jabatan

fungsional, Panuju Bekti :

“ Banyak faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh belum optimal antara lain yang pertama, tingkat SDM petani yang tidak merata sehingga alih teknologi tidak semua petani mudah menyerapnya. Yang kedua, dukungan pemerintah daerah tingkat II masih sangat terbatas dimana setiap penyuluh hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 perbulan untuk bantuan biaya operasional penyuluh. Yang ketiga, kepala desa apatis dengan pembangunan pertanian yang ada di daerahnya, karena banyak kepala desa yang bengkoknya tidak digarap sendiri tetapi disewakan/digarapkan orang lain . karena tidak menanam sendiri sehingga acuh tak acuh karena merasa tidak membutuhkan. Yang keempat, di tingkat Kecamatan, pak Camat tidak paham dengan pertanian. Kalau dulu malam pun pak Camat kadang ikut penyuluhan di kelompok tani tetapi sekarang tidak ada

lagi yang seperti itu. Yang kelima, di tingkat dinas, koordinasi antar bidang yang ada di Dinas Pertanian dengan penyuluh belum sepenuhnya berjalan secara sinergi. Sebagai contoh dalam hal pembagian alat mesin pertanian ke kelompok tani, bidang sarpras berjalan sendiri tanpa kulo nuwun atau melibatkan penyuluh yang ada di lapangan. Yang keenam adalah sarana prasarana yang dimiliki Penyuluh pertanian pemerintah kalah jauh dibanding dengan penyuluh swasta “

3. Penyuluh pertanian tingkat kabupaten, Wahyudi :

“ Menurut saya faktor –faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian belum optimal adalah faktor sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kendaraan roda 2 untuk operasional dilapangan, LCD proyektor, laptop, pendanaan untuk membuat sarana penyuluhan seperti leaflet, brosur, liptan dan lain-lain masih terbatas. Dan ada lagi faktor lainnya yaitu sistem reward and punishment belum optimal diterapkan”

4. Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Ngombol, Mahmudin :

“ Faktor-faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian kurang optimal menurut saya diantaranya pertemuan banyak yang masih numpang di pertemuan desa karena terkait dengan pendanaan. Kelompok tidak mempunyai jadwal pertemuan sendiri, selain itu sarana prasarana yang dimiliki penyuluh untuk mendukung kegiatan penyuluhan masih kurang. Dalam 1 BPP hanya ada 1 LCD proyektor misalnya seperti ditempat saya. Selain itu banyak penyuluh PNS yang memasuki masa pensiun sehingga penyuluh harus menambah wilayah binaannya, ”

Sementara wawancara yang dilakukan hari Senin tanggal 17 September

2018 terhadap 3 orang informan yang berasal dari petani menyatakan sebagai berikut :

1. Ketua Gapoktan Makmur Desa Sedayu Kecamatan Loano, Yusuf

Harbanto :

“ Penyuluh itu kurang menguasai materi kemudian program-program yang ada di Dinas Pertanian terkadang tidak disampaikan secara jelas ke petani “

2. Ketua Kelompok Tani Sidodadi Desa Kroyo Kecamatan Gebang,

Darmadi:

“ Penyuluh yang ada di tempat saya pendidikannya kalau ngga salah cuman SMA jadi kalau menyampaikan materi sok kurang menguasai kalau ditanya masalah ilmu pertanian terus dia tidak tau jawabannya bilanginya nanti saya tanyakan ke yang lebih tau “

3. Ketua Gapoktan Sinar Mulia Desa Kaliglagah Kecamatan Loano, Waridi :

“ Penyuluh kadang hanya bisa teorinya tetapi prakteknya tidak. Contohnya tahun ini kami dapat program tanam kedelai. Selama ini kami belum pernah tanam kedelai. Penyuluhnya memberitahu bagaimana cara menanam kedelai yang baik dan benar padahal dia sendiri belum pernah menanam kedelai “

Simpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo kurang optimal disebabkan oleh :

1. Faktor individu yaitu :

- Kurangnya pengetahuan dan kemampuan personal penyuluh pertanian.
- Kurangnya intensitas pelatihan ataupun bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas kemampuan dan ketrampilan penyuluh pertanian.

2. Faktor sistem yaitu :

- Terbatasnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung operasional kegiatan penyuluhan.
- Kurangnya sinergitas antara penyuluh dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Purworejo dalam mendukung pelaksanaan program-program kegiatan.

- Fasilitas prasarana dan sarana penyuluhan yang kurang lengkap.
- Penerapan sistem *reward and punishment* yang belum optimal.

3. Faktor kepemimpinan yaitu pengawasan terhadap kerja penyuluh pertanian dilapangan yang masih kurang.
4. Faktor kontekstual (situasional) yaitu birokrasi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang cenderung apatis terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya serta tingkat sumber daya manusia petani yang rendah menyebabkan alih teknologi/ ilmu pertanian menjadi sulit karena kemampuan petani menyerap teknologi/ ilmu pertanian rendah.

D. Upaya Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Purworejo .

Upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo menjadi keharusan untuk dilaksanakan guna tercapainya keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dilakukan wawancara dengan para informan.

Wawancara yang dilakukan dengan 4 (empat) informan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 perihal bagaimana upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan Kabupaten Purworejo, Sukusnanto :

“ Sistem penyuluhan dikembalikan seperti dulu dimana pelaksanaan dan pengawasan sangat jelas dan terarah. Penyuluh harus mampu menguasai daerah di wilayah binaannya sedetail-detailnya baik dari aspek pertaniannya maupun sosial budayanya. Disamping itu demplot-demplot untuk ujicoba penyuluh harus lebih diperbanyak lagi. Tentunya ini perlu dukungan dana dari pemerintah untuk menyediakan lahan demplot sehingga penyuluh itu bekerja sambil belajar. Lebih banyak mengikuti diklat-diklat sehingga penyuluh tidak ketinggalan teknologi dan sarana penyuluhan lebih dilengkapi.”

2. Koordinator kelompok jabatan fungsional, Panuju Bekti :

“ Untuk mendukung upaya peningkatan kinerja penyuluh adalah dukungan pemerintah dalam menaikkan bantuan biaya operasional, lebih bersinergi antara penyuluh dengan bidang-bidang di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian penyediaan sarana prasarana penyuluhan lebih dilengkapi dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan bimtek bagi para penyuluh.”

3. Penyuluh pertanian kabupaten, Wahyudi :

“ Upaya untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian antara lain selalu berusaha untuk terus melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan penyuluh guna menunjang kegiatan tupoksinya, serta menjalankan sistem reward dan punishment dengan baik.”

4. Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Ngombol, Mahmudin :

“ Untuk meningkatkan kinerja penyuluh upaya yang dapat dilakukan antara lain memperbanyak intensitas pelatihan bagi para penyuluh, meningkatkan kelengkapan sarana prasarana penyuluhan serta idealnya setiap BPP punya lahan untuk demplot-demplot.”

Sementara wawancara yang dilakukan hari Senin tanggal 17 September 2018 terhadap 3 orang informan yang berasal dari petani menyatakan sebagai berikut :

1. Ketua Gapoktan Makmur Desa Sedayu Kecamatan Loano, Yusuf Harbanto:

“ Penyuluh itu bagi petani seperti induk ayam dan petani adalah anak ayamnya jadi penyuluh itu harus bisa memberi contoh serta

menyemangati petani. Petani merasa nyaman dan senang dalam bercocok tanam. Penyuluh harus bisa menjembatani antara kebutuhan kelompok dengan program-program yang ada di dinas jadi penyuluh harus proaktif. Tau program di dinas dan tau kebutuhan petani. “

2. Ketua Kelompok Tani Sidoadi Desa Kroyo Kecamatan Gebang, Darmadi :

“ Harapannya penyuluh itu lebih banyak turun ke lapangan. Ikut bersama petani turun ke sawah dan penyuluh harus lebih menguasai ilmu pertanian baik secara teori maupun prakteknya. “

3. Ketua Gapoktan Sinar Mulia Desa Kaliglagah Kecamatan Loano, Waridi :

“ Penyuluh harus lebih banyak belajar sehingga ketika memberikan penyuluhan ke petani-petani mereka menguasai dan tau persis apa yang mereka sampaikan ke petani. “

Dari hasil wawancara diatas maka upaya untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan :

1. Sistem pengawasan penyuluh pertanian yang lebih jelas.
2. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kegiatan penyuluhan seperti penyediaan kendaraan roda 2 oleh pemerintah untuk kegiatan operasional lapangan bagi setiap penyuluh pertanian, laptop, penambahan jumlah LCD proyektor dan alat peraga penyuluhan di setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat kecamatan.
3. Memperbanyak sarana pembelajaran kegiatan penyuluhan bagi penyuluh di setiap balai penyuluhan pertanian tingkat kecamatan seperti lahan demplot, laboratorium pertanian dan lain-lain.
4. Meningkatkan intensitas pelatihan/ bimbingan teknis (bimtek) setiap penyuluh pertanian.

5. Peningkatan dukungan pemerintah daerah untuk mendukung operasional kegiatan penyuluhan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah nominal bantuan operasional kepada setiap penyuluh pertanian.
6. Meningkatkan sinergitas antara penyuluh pertanian dengan bidang-bidang di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program-program kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama membahas program-program kegiatan yang sedang dan akan berjalan sekaligus mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan.
7. Setiap penyuluh pertanian harus lebih menguasai wilayah binaannya baik dari aspek pertanian maupun sosial budayanya.
8. Setiap penyuluh pertanian selalu *update* ilmu, informasi dan teknologi bidang pertanian sehingga mampu memberikan penyuluhan ke petani dengan baik.
9. Menjalankan sistem *reward and punishment* dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo kurang optimal disebabkan oleh faktor individu yaitu kurangnya pengetahuan dan kemampuan personal penyuluh pertanian, kurangnya intensitas pelatihan ataupun bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas kemampuan dan ketrampilan penyuluh pertanian, faktor sistem yaitu terbatasnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung operasional kegiatan penyuluhan, kurangnya sinergitas antara penyuluh dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan program-program kegiatan, fasilitas prasarana dan sarana penyuluhan yang kurang lengkap dan penerapan sistem *reward and punishment* yang belum optimal, faktor kepemimpinan yaitu pengawasan terhadap kerja penyuluh pertanian dilapangan yang masih kurang dan faktor kontekstual (situasional) yaitu birokrasi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang cenderung apatis terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya serta tingkat sumber daya manusia petani yang rendah menyebabkan alih teknologi/ ilmu pertanian menjadi

sulit karena kemampuan petani menyerap teknologi/ ilmu pertanian rendah.

2. Secara umum kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo sudah baik. Hal ini didukung antara lain tingkat pendidikan penyuluh pertanian yang sudah baik, pengangkatan tenaga kontrak/ Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) penyuluh pertanian menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah telah berusaha melengkapi sarana prasarana penyuluhan seperti pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan secara bertahap meskipun belum seluruhnya kecamatan di Kabupaten Purworejo memiliki gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sendiri dan penyediaan sarana prasarana penyuluhan meskipun masih sangat terbatas, motivasi penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang sudah baik serta keberadaan penyuluh pertanian dirasakan manfaatnya oleh petani. Meskipun demikian kinerja penyuluh pertanian masih perlu untuk ditingkatkan terutama dalam hal intensitas kunjungan lapangan serta penguasaan materi penyuluhan baik secara teori maupun praktek.
3. Upaya untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan sistem pengawasan penyuluh pertanian yang lebih jelas, meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kegiatan penyuluhan seperti penyediaan kendaraan roda 2 oleh pemerintah untuk kegiatan operasional lapangan bagi setiap penyuluh pertanian, laptop, penambahan jumlah LCD proyektor dan alat peraga

penyuluhan di setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, memperbanyak sarana pembelajaran kegiatan penyuluhan bagi penyuluh pertanian di setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan seperti lahan demplot, laboratorium pertanian dan lain-lain, meningkatkan intensitas pelatihan/bimbingan teknis (bimtek) setiap penyuluh pertanian, peningkatan dukungan pemerintah daerah untuk mendukung operasional kegiatan penyuluhan., meningkatkan sinergitas antara penyuluh pertanian dengan bidang-bidang di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program-program kegiatan, setiap penyuluh harus lebih menguasai wilayah binaannya baik dari aspek pertanian maupun sosial budayanya dan selalu *update* ilmu, informasi dan teknologi bidang pertanian sehingga mampu memberikan penyuluhan ke petani dengan baik dan menjalankan sistem *reward and punishment* dengan baik.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Purworejo adalah diperlukan komitmen dan dukungan dari stakeholder terkait antara lain :

1. Setiap individu penyuluh pertanian secara sungguh-sungguh harus berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan.
2. Meningkatkan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian sehingga intensitas

pelatihan/ bimbingan teknis dapat ditambah dan biaya operasional bagi setiap penyuluh pertanian.

3. Diperlukan dukungan anggaran pemerintah untuk meningkatkan kelengkapan sarana prasarana penyuluhan sesuai kebutuhan serta sarana pembelajaran kegiatan penyuluhan.
4. Meningkatkan sinergitas antara penyuluh pertanian dengan bidang-bidang di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program kegiatan.
5. Penerapan sistem *reward and punishment* yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara jelas . Hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan oleh pemerintah terkait penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja penyuluh pertanian.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap kerja penyuluh pertanian melalui pembentukan tim pengawas yang profesional dan independen.
7. Diperlukan dukungan pemerintah tingkat desa dan kecamatan yang lebih baik untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian di masing-masing wilayah kerja.
8. Metoda penyuluhan yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik petaninya sehingga kegiatan penyuluhan dapat diterima dan diserap dengan mudah oleh mereka.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam penelitian ini menggunakan metoda deskripsi kualitatif sehingga dalam penelitian berikutnya agar menggunakan metode lain untuk dapat *menggeneralisasi* hasil.
2. Keterbatasan subyek yang *diobservasi* sehingga dalam penelitian berikutnya agar memperluas subyek yang *diobservasi*.
3. Keterbatasan lingkup *observasi* sehingga dalam penelitian berikutnya agar memperluas lingkup yang *diobservasi*.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Amins, A. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Ariwibowo, R.N. 2016. *Evaluasi Kinerja Pegawai di Kantor kecamatan Lendah Kabupaten KulonProgo Tahun 2016.* Tesis Magister tak dipublikasikan, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. 2017. *Kabupaten Purworejo dalam Angka Tahun 2017*, Purworejo : BPS Kab. Purworejo
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. 2016. *Purworejo dalam Angka Tahun 2016*, Purworejo : BPS Kab. Purworejo
- Bahua, M.I. 2016. *Kinerja Penyuluh Pertanian*, Yogyakarta: deepublish
- Banunack, M.F, Suminah dan Karsidi, R. 2017. Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Penyuluhan*, Vol.13 No. 2 hal 210 – 221
- Data Kelembagaan Kelompoktani, Kelompok Wanita Tani, P3A dan GP3A Tahun 2017.* 2017. Tidak dipublikasikan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- Data Kelembagaan Kelompoktani, Kelompok Wanita Tani, P3A dan GP3A Tahun 2016.* 2016. Tidak dipublikasikan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- Fitria, N. 2016. *Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Bayan Kabupaten Purworejo*, Tesis Magister tak dipublikasikan, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
- Istikumatun, S. 2015. *Strategi Peningkatan Kinerja pegawai Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2015*, Tesis Magister tak diterbitkan, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*,ed.3, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Marliati, Sumardjo, Asngari, P.S, Tjitropranoto, P dan Saefuddin, A. 2008. Faktor-Faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dalam

Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau),
Jurnal Penyuluhan, Vol.4 No. 2

- Pakpahan, H.T. 2017. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta : Plantaxia
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
- Putri, I.W, Fatchiya, A. dan Amanah, S. 2016. Pengaruh Pelatihan Non Teknis Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian BP4K di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal Penyuluhan, Vol.12 No. 1 hal 43-50*
- Puspitasari, L. 2009. Persepsi Petani Terhadap Performansi Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pengembangan Agribisnis Kedelai di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, *Mediagro, Vol. 5 No. 1 hal 44-51*
- Sapar, Jahi, A, Asngari, P.S, Amiruddin dan Purnaba, I.G.P. 2012. Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan, *Jurnal Penyuluhan Vol. 8 No. 1*
- Sinambela, L.P. 2012. *Kinerja pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratis, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*, Bandung: Alfabeta
- Sunartomo, A.F. 2016. Kapasitas Penyuluh Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Jawa Timur, *Agriekonomika, Vol.2 No.2*
- Syafruddin, Hariadi, S.S dan Wastutiningsih, S.P. 2013. Kinerja Penyuluh Pertanian Berdasarkan Faktor Personal dan Situasional, *Jurnal Psikologi, Vol.2 No.2*
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan